

TESIS

**STRATEGI PERJUANGAN PEMUDA DALAM REVOLUSI
KEMERDEKAAN DI LUWU 1945-1946**

**THE STRATEGY OF YOUTH STRUGGLE IN INDEPENDENCE REVOLUTION
IN LUWU 1945-1946**



Oleh:

MASITA

F052201001

PROGRAM STUDI MAGISTER SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

**STRATEGI PERJUANGAN PEMUDA DALAM REVOLUSI
KEMERDEKAAN DI LUWU 1945-1946**

TESIS

**Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program
Studi Sejarah**

Diajukan oleh:

MASITA

(F052201001)

Kepada

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2023

TESIS
STRATEGI PERJUANGAN PEMUDA DALAM REVOLUSI
KEMERDEKAAN DI LUWU 1945-1946
THE STRATEGY OF YOUTH STRUGGLE IN INDEPENDENCE
REVOLUTION IN LUWU 1945-1946

Disusun dan diajukan oleh:

MASITA
F052201001

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 30 Mei 2023

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:
Komisi Penasihat

Ketua

Anggota



Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum.
NIP. 195709121985031003



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A
NIP. 197410162003121001

Ketua Program Studi Megister Sejarah



Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A
NIP. 197410162003121001



Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masita

NIM : F052201001

Program Studi : Sejarah

Jenjang : S-2 Sejarah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “ Strategi Perjuangan Pemuda Dalam Revolusi Kemerdekaan Di Luwu 1945-1946” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran tersebut.

Makassar, 10 Juni 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “ STRATEGI PERJUANGAN PEMUDA DALAM REVOLUSI KEMERDEKAAN DI LUWU 1945-1946”

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat gelar S2 pada program Studi Magister Sejarah Universitas Hasanuddin Makassar. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang tercinta Bapak Andi Sadi Baso dan ibu Cali, serta seluruh saudara dan saudari tersayang yang telah memberikan saya support baik dari segi materi maupun doa yang tidak pernah putus. Selain itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Akin Duli, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. Amrullah Amir, M.A.,Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Sejarah dan juga sebagai pembimbing penulis
4. Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum selaku pembimbing penulis
5. Dr. Nahdia Nur, M. Hum, Dr. Ilham S.S M. Hum dan Dr. Ida Liana Tanjung, M. Hum, selaku penguji
6. Para dosen Program Studi Magister Sejarah.
7. Para pegawai dan staf Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya, khususnya Pak Mullar dan Ka' Andi Muhammad Syafri.

8. Serta saudara-saudara yang berjasa membantu penulis Annisa Arief S. Pd, Andi Cindra Maulia, Sri Ayuni Ibrahim S. P, Fitria Ramadani Ali S.Pd, Bernike S.Pd, Fajar Sidiq Limola S,S M. Hum, Serly Darmawati Ippal S.S dan Rismayani Banne.

Makassar, 25 Mei 2023

Masita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Konseptual Dan Pendekatan	18
F. Sumber Penulisan Dan Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II SEJARAH SINGKAT TANAH LUWU	25
A. Sejarah Tanah Luwu Dari Masa Ke Masa	26
1. Luwu Pada Masa Kerajaan	26
2. Luwu Pada Masa Kolonial Belanda	28
3. Luwu Pada Masa Pendudukan Jepang	36

B. Stratifikasi Sosial, Kondisi Budaya Dan Peran Agama Dalam	
Masayrakat Luwu.....	44
1. Stratifikasi Sosial	44
2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Luwu	48
3. Peran Agama Dalam Masyarakat Luwu	49
BAB III SITUASI PASCA KEMERDEKAAN DAN BERITA KEDATANGAN	
TENTARA AUSTRALIA DI LUWU	52
A. Berita Kemerdekaan RI Dan Situasi Pasca Kemerdekaan	53
1. Reaksi Masyarakat Luwu Terhadap Berita Kemerdekaan	53
2. Kabinet Revolusi Kedatuan Luwu	57
B. Tokoh Pemuda Revolusi Kemerdekaan	58
1. Dinamika Pemuda	58
2. Tokoh Pemuda Dari Golongan Bangsawan Luwu	61
3. Tokoh Pemuda Dari Golongan Terpelajar	69
4. Tokoh Pemuda Dari Golongan Agamawan/Cendekia	77
C. Berita Tentang Kedatangan Tentara Australia	80
1. Kedatangan Tentara Australia Di Makassar	80
2. Kedatangan Tentara Australia Di Luwu	85
BAB IV ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN GERAKAN SEMI RAHASIA	
SEBAGAI STRATEGI PERJUANGAN.....	88
A. Pembentukan Wadah Organisasi Sebagai Strategi Perjuangan Pada Masa	
Revolusi Kemerdekaan	88
1. Soekarno Moeda (SM)	88
2. Pemuda Nasional Indonesia (PNI).....	93
3. Pemuda Republik Indonesia (PRI).....	96
4. Pembela Keamanan Rakyat (PKR)	99

B. Pembentukan Strategi dan Gerakan Semi Rahasia	101
1. Membuat Benteng Pertahanan	101
2. Tim PKR Ekspedisi	102
3. Membentuk Komando Pertempuran	103
4. Penyerangan Markas KNIL/NICA	105
5. Perampasan Senjata di Daerah Sekitaran Palopo	106
a. Perampasan Senjata di Gedung SBHK	106
b. Perampasan Senjata di Gedung Barang Latuppa	107
c. Perampasan Senjata di Malanggo	107
d. Perampasan Senjata di Rembong	107
6. Perlawanan Gerilya Pemuda PRI	108
 BAB V KESIMPULAN	 110
 DAFTAR PUSTAKA	 114
 LAMPIRAN	 118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Seorang Wartawan Sekaligus Sentral Pemrakarsa Organisasi
Soekarno Moeda M. Yusuf Arief (Koloeksi Keluarga Andi Achmad) 120
2. Foto Pemuda Andi Achmad Pendiri Organisasi Soekarno Moeda
(Koleksi Keluarga Andi Achmad) 121
3. Foto Pimpinan PKR Luwu Yang Dijatuhi Hukuman Mati Oleh Mahkamah
Militer NICA 122
4. Piagam Penghargaan Perjuangan Andi Achmad 123
5. Arsip Pemeriksaan Perkara Tahun 1946-1948 Tentang Kasus Perlawanan
Pemuda Republik Indonesia 124
6. Arsip Pemeriksaan Perkara Tahun 1946-1948 Tentang Pemberontakan
Yang Dilakukan Pemuda 125
7. Arsip Pemeriksaan Perkara Tahun 1946-1947 Tentang Kasus
Pemberontakan di Daerah Palopo 126

ABSTRAK

MASITA, Strategi Perjuangan Pemuda Dalam Revolusi Kemerdekaan Di Luwu 1945-1946 (Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum dan Dr. Amrullah Amir, M.A).

Penelitian tentang “ Strategi Perjuangan Pemuda Dalam Revolusi Kemerdekaan di Luwu 1945-1946” bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bagaimana bentuk perjuangan rakyat Luwu terhadap tentara Sekutu dalam mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah dengan langkah-langkah kegiatan secara berurutan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian pustaka dan wawancara. Penelitian dilakukan guna mengambil dan mengumpulkan data-data baik, sumber sekunder maupun primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi perjuangan pemuda Luwu melawan Sekutu untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun strategi yang dilakukan pemuda yaitu membentuk wadah organisasi, membentuk benteng pertahanan, membentuk komando pertempuran, menyerang markas KNIL/NICA dan merampas senjata tentara Jepang.

Kata kunci : Perjuangan, Strategi, Serangan, Pemuda.



ABSTRACT

MASITA, The Strategy of Youth Struggle In The Independence Revolution In Luwu 1945-1946 (Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum and Dr. Amrullah Amir, M.A).

The research aims to provide an understanding to the public about how the Luwu people's struggle with the allied army took shape in defending the independence of the republic of Indonesia. This research was a historical study that used historical method with sequential activity steps, i.e. heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data collection used was literature research and interviews. The data used were both secondary and primary data. The results of this study show the struggle strategy of Luwu youth against the Allies to defend the independence of the Republic of Indonesia. The strategy carried out by the youth was to form an organizational platform, form a fort, form a battle command, attack the KNIL/NICA headquarters and seize weapons from the Japanese army.

Keywords : stuggle, strategy, attack, youth.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Meskipun pada awalnya pihak Jepang berusaha merahasiakan kekalahannya, namun pada akhirnya kekalahan Jepang diketahui oleh Indonesia, termaksud tokoh-tokoh pergerakan yang ada di pusat dan daerah. Di pusat para tokoh-tokoh pejuang mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya setelah melalui berbagai perdebatan, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pengangsaan Timur No. 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena pada hari itu Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi sebagai tanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan akan terbebas dari segala bentuk penjajahan.¹ Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan suka cita oleh segenap rakyat Indonesia, sebab kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan impian lama yang didambakan seluruh masyarakat Indonesia. Atas kemerdekaan Indonesia pula para pemuda bangsa di seluruh penjuru nusantara membuat strategi perjuangan

¹ Sarita Pawiloy, *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang: Dewan Harian Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan, 1987), hlm. 54.

agar dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ingin kembali di kuasai oleh para sekutu.

Di Sulawesi Selatan, sebelum Gubernur Sulawesi Dr. Ratulangi menyampaikan secara resmi berita proklamasi, beberapa pemuka masyarakat yang cukup akrab dengan orang Jepang telah mengetahui kabar penting itu. Ada yang mendengar langsung dari radio miliknya, adapula melalui pemberitahuan tidak resmi, hal ini hampir terjadi di semua kota-kota kecil di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Palopo.² Berita mengenai proklamasi didengar langsung oleh Andi Achmad dari bisikan seorang tentara Jepang yang bernama Sakata.³ Sejak berita proklamasi mulai tersebar ke seluruh pelosok, kalangan pemuda dan pemuka masyarakat sadar akan kondisi keamanan pasca proklamasi. Hal ini muncul adanya kekhawatiran akan datangnya kembali pihak Belanda. Maka perlahan-lahan mulai muncul semacam pusat-pusat kegiatan pemuda pendukung kemerdekaan, yaitu Kota Makassar dan sekitarnya, Kota Pare-Pare dan sekitarnya dan Kota Palopo dan sekitarnya. Kekhawatiran akan datangnya kembali Belanda ternyata menjadi kenyataan.

Berita kemerdekaan Indonesia itu ditanggapi secara ragu-ragu oleh banyak pihak tetapi hal itu tidak menurunkan semangat sebagian pemuda Luwu.⁴ Muh.

² Sanusi Dg. Mattata, *Luwu Dalam Revolusi*, (Ujung Pandang: Bakti Baru, 1976), hlm. 98.

³ Sakata adalah seorang perwira tantara Jepang. Selama sekutu belum Kembali berkuasa di Luwu ia ditugaskan sebagai mata-mata Jepang. Namun ia memiliki kedekatan khusus (sahabat) dengan Andi Achmad.

⁴ Sarita Pawiloy, *op cit*, hlm. 79.

Yusuf Arief dan Andi Achmad pada waktu itu, memprakarsai satu pertemuan yang didirikan oleh pemuda-pemuda yang selama ini menambahkan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 malam, sesuai kesepakatan diadakan pertemuan yang dihadiri oleh tujuh orang pemuda progresif dan kaum republik . Mereka adalah Andi Makkulau, Andi Achmad, Andi Tenriadjeng, Martin Guli Dg Mallimpo, Muh Yusuf Arief, H. Abdul Kadir Daud dan Mungkasa. Adapun M. Landau seorang tokoh pemuda Muhammadiyah, ketika itu semestinya hadir pula, namun setelah rapat berakhir ia tidak juga muncul. Malam itu mereka membentuk organisasi semi rahasia sebagai wadah pergerakan yang diberi nama Soekarno Moeda. Selain itu disepakati pula Andi Makkulau Opu Dg Parebba sebagai ketua dan anggota-anggotanya adalah Muh. Yusuf Arief, Andi Achmad, M. Landau Dg Mallimpo, H. Abdul Kadir Daud dan Mungkasa.

Organisasi Soekarno Moeda ini terdapat lima golongan yang menjadi kekuatan sosial dalam masyarakat terpadu dalam memberikan dukungan yaitu pertama golongan bangsawan yang merupakan lapisan masyarakat paling tinggi ialah Andi Makkulau dan Andi Achmad, kedua golongan terpelajar atau golongan yang memiliki kecerdasan dalam berbagai bidang seperti pendidikan yang tinggi serta memiliki pengetahuan yang cukup luas yang diwakili oleh Muh. Yusuf Arief, ketiga kekuatan dari unsur cendikia atau kaum ulama yaitu H. Abdul Kahir Daud, keempat kekuatan dari masyarakat biasa yang memiliki kekerabatan dengan golongan bangsawan yakni M. Landau Dg Mabbate dan M. Guli Dg Mallimpo dan yang terakhir adalah kekuatan dari masyarakat biasa Mungkasa. Setelah terbentuknya

organisasi Soekarno Moeda, maka mulai terasa bahwa keberadaan senjata sangat perlu bagi kelangsungan perjuangan. Keberadaan tersebut tentunya sebagai bahan perlengkapan dan persediaan bagi pemuda dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Pada awalnya organisasi Soekarno Moeda giat mencari senjata dengan cara yang ilegal dengan pihak Jepang, namun berbagai usaha tersebut selalu mengalami kegagalan, karena upaya memperoleh senjata secara damai terus gagal. Maka pada tanggal 2 September 1945 Andi Achmad kemudian mengkoordinir serta membuat strategi perampasan senjata di gudang Hakim Tai dalam kota Palopo, dibawah pimpinan Andi Achmad, puluhan pemuda bergerak tengah malam buta. Suasana orang Jepang yang lagi tidur pulas dimanfaatkan oleh pemuda, sehingga pemuda pun dengan leluasa dapat memasuki gudang senjata.

Dalam aksinya usaha pemuda untuk mendapatkan senjata tidak sia-sia, mereka berhasil membawa 20 pucuk senjata laras panjang, puluhan pistol. Namun musibah bagi mereka ketika salah seorang dari mereka melakukan kekeliruan, salah satu pemuda menarik pistol yang terselip dipinggang salah seorang tantara Jepang yang sedang tidur lelap dan membangunkan orang Jepang tersebut dan seraya berteriak. Segera pemuda-pemuda melarikan senjata yang sebagian besar mereka naikkan keatas mobil.⁵ Adapun yang terlibat dalam perampasan senjata dibawah pimpinan Andi Achmad antara lain Andi Sufri, Udi, Abubakar Umar, Padare, Umar Abdullah, Usman Said, Abdullah Dg Mallimpo, Abdullah Rahman Said, Andi Rusman, La

⁵ Sanusi Dg Mattata, *op cit*, hlm. 79.

Tou, Ali Idrus, Radhi, Abdullah, Abdul Rahim Bakkas, Hamid Bombay, dan H. Said. Sebagai langkah nyata mereka pun melakukan beberapa aktivitas yang bersifat terbuka seperti melakukan rapat umum di bioskop Palopo yang diikuti oleh berbagai kalangan dan melakukan pengibaran bendera merah putih. Namun pada tanggal 17 September 1945 organisasi Soekarno Moeda diganti menjadi organisasi Pemuda Nasional Indonesia, yang wilayah perjuangan dan pergolakannya semakin luas yang meliputi wilayah *onderafdeling* Palopo dan sekitarnya sebagai tujuan pokok terjadinya perubahan konsep dan strategi organisasi ini yakni (1). Memperluas jangkauan keanggotaan sebagai organisasi resmi, (2). Mempersiapkan munculnya organisasi bersenjata, (3). Memperluas tujuan dan sifat perjuangan, yakni kemerdekaan dan kepentingan nasional.

Belanda kembali ke Indonesia mendarat di Jakarta dengan memboncengi sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Tujuan kedatangan sekutu dan NICA adalah untuk membantu Belanda menanamkan kembali kekuasaannya di tanah air Indonesia dan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Ketika kapal perang NICA datang dari Makassar dan menembaki Kota Palopo dan mendarat, Kota Palopo sepenuhnya telah dikuasai oleh pihak tentara NICA, sementara itu para pemuda menyarankan kepada Datu dan Permaisuri beserta dewan hadat agar segera meninggalkan Kota Palopo. Hal demikian perlu dilakukan mengingat ancaman keselamatan rakyat di dalam Kota Palopo yang semakin berbahaya, selain itu pemuda mempertimbangkan keselamatan sang Datu dan Permaisurinya. Setelah itu Datu beserta keluarganya beserta para pemuda

memutuskan membuat strategi dan melakukan perlawanan di hutan-hutan dengan cara bergerilya.⁶ Dengan demikian pemerintah Kerajaan Luwu menuju Malangke, lalu Cappasalo, Pongko, Wara dan terakhir Latou (Batu Pute). Namun sebelum sampai di Latou berbagai peristiwa yang dihadapi oleh para pemuda pejuang di berbagai tempat, seperti dalam peristiwa pertempuran Tarue, pertempuran itu terjadi ketika penghadangan di Tarue yang dilakukan oleh para pemuda yang dipimpin oleh Andi Achmad guna menghalau dan mengalihkan penyerangan operasi pasukan NICA ke daerah Masamba. Sebab pada saat itu rombongan Datu Luwu berada dalam perjalanan menuju Cappasolo, ketika itu para pemuda Tarue berhasil melumpuhkan dan menawan kaki tangan NICA yang berada di Tarue, serangan yang dilancarkan oleh pasukan NICA pada saat itu mampu diatasi oleh pemuda Rongkong atas dan pasuka pemuda Walenrang di bawah pimpinan Attas.⁷ Atas kekalahannya tentara NICA datang ke Tarue sebagai bentuk pembalasan, pertempuran pun tak terhindarkan lagi selama tiga jam kontak senjata pun terjadi. Pertempuran tersebut menyebabkan korban jiwa

B. Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Pada masa sebelum terjadinya revolusi kemerdekaan, yakni periode 1942- 1945, wilayah Luwu sepenuhnya dikuasai oleh penduduk Jepang. Pendudukan Jepang

⁶ M. Rasiyid Ridha, *Perjuangan Rakyat Luwu Mempertahankan Kemerdekaan*, (Makassar, Rayhan Intermedia, 2022), hlm. 116.

⁷ Sarita Pawiloy , *Arus Revolusi 45 di Sulawesi Selatan*, (Dewan Harian Angkatan 45 Provinsi Sulsel, 1987), hlm. 317.

terhadap wilayah Indonesia termasuk di daerah Luwu, lambat laun menyadarkan adanya kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan sangat gembira oleh masyarakat yang telah lama dinanti-nantikan. Berbagai usaha pun dilakukan masyarakat baik secara individu maupun kelompok guna mempertahankan kemerdekaan tersebut sehingga kehadiran Belanda kembali ke Indonesia.

Sebagai seorang baru menginjak usia remaja atau pemuda, dihadapkan pada kondisi bangsa Indonesia di bawah penguasa bangsa asing secara berturut-turut yaitu Kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang. Pada masa revolusi kemerdekaan di Luwu ada tiga kelompok masyarakat yang memiliki peran penting yaitu kelompok bangsawan, kelompok masyarakat yang memiliki peran penting yaitu kelompok bangsawan, kelompok agama dan kelompok pemuda.⁸ Kelompok bangsawan dalam hal ini datu dan pemangku adatnya tampil sebagai pemimpin selama berlangsungnya revolusi kemerdekaan. Kelompok agama atau cendikiawan berusaha meyakinkan masyarakat adanya kebenaran berita proklamasi kemerdekaan dengan cara berkhotbah di masjid-masjid. Selain itu, mereka meyakinkan masyarakat bahwa perlawanan mereka hanya untuk membebaskan mereka dari penindasan dan itu jihad. Sedangkan pemuda dengan semangat nasionalismenya melakukan perlawanan secara fisik. Oleh karena itu, kelompok pemuda adalah yang memiliki andil besar terhadap jalannya perlawanan. Hal ini dikarenakan kelompok pemuda membentuk organisasi

⁸*Ibid*, hlm. 90.

kepemudaan. Organisasi tersebut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satu pemuda yang berasal dari golongan bangsawan aktif melakukan perlawanan adalah Andi Achmad. Namun usaha perlawanan Andi Achmad tidak dilakukan seorang diri melainkan ia memilih sebuah wadah perjuangan yang berbentuk organisasi perjuangan.

Organisasi perjuangan yang dimaksud yaitu organisasi Soekarno Moeda menjadi cikal bakal munculnya perlawanan dalam bentuk atau wadah organisasi. Selain itu, dalam perjalannya, pemuda-pemuda Luwu melakukan perlawanan, organisasi ini pun telah diijelmakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 Soekarno Moeda dibentuk secara rahasia. Kemudian pada tanggal 17 September 1945 pemuda memutuskan untuk mengubahnya menjadi Pemuda Nasional Indonesia, dan sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap kedatangan Belanda yang membawa Sekutu maka PNI diubah lagi menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada tanggal 15 Oktober 1945. Terakhir pada tanggal 1 Maret 1946 menjadi Pemuda Keselamatan Rakyat (PKR). Penjelmaan terakhir dari organisasi ini (PKR) merupakan bukti bahwa melalui wadah perjuangan mereka bertekad terus melakukan perlawanan. Organisasi yang dijadikan wadah perjuangan juga membuktikan peran atau andil pemuda-pemuda Luwu dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kedatangan Belanda yang membonceng Sekutu ke Sulawesi Selatan tak terkecuali di wilayah Kerajaan Luwu memaksa para pemuda Luwu segera menyusun strategi. Strategi yang berhasil disusun pada saat itu yakni melalui gerakan dengan cara semi rahasia. Ditunjukkannya Andi

Achmad selaku kepala polisi istimewa dalam PNI juga tak luput dimanfaatkan guna menyusun strategi perlawanan hingga menghadapi tentara NICA secara fisik maupun geriliya.

Batasan temporal dalam penelitian ini yaitu 1945-1946. Alasan mengambil tahun tersebut dikarenakan pada tahun tersebut kemerdekaan Indonesia telah di sebar luaskan dan pada tahun tersebut pula tentara sekutu dan NICA kembali ingin merampas wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Luwu ?
2. Bagaimana peran organisasi dalam perjuangan kemerdekaan di Luwu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu karya ilmiah tentunya diharapkan memiliki tujuan dan manfaat, baik bagi pribadi penulis maupun orang lain. Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama memahami dan memberikan gambaran perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Luwu. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mengungkapkan dinamika persoalan, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan teoritis.

Kedua, secara Metodologi penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Luwu dan organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para pemuda Luwu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ketiga, secara historiografis penelitian ini bertujuan untuk menamba referensi dan wawasan kita untuk mengetahui bagaimana perjuangan para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Luwu.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa tulisan yang telah mengkaji tentang revolusi kemerdekaan di Luwu seperti Sanusi Dg. Mattata⁹ terbitan Bakti Baru berjudul Luwu Dalam Revolusi, mengungkapkan daerah kekuasaan Belanda di zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang serta Kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda menguasai daerah yang kaya ini, maka lama kelamaan kerajaan ini diperkecil wilayahnya oleh saiaset “ Divide at Imp pera” Belanda yang terkenal itu, dengan melepaskan Poso berdiri sendiri sebagai satu *Afdeeling*. Demikian juga distrik Pitumpanua di dimasukkan ke dalam kekuasaan Wajo . Sedangkan Luwu sendiri dinamainya pula *Afdeeling* yang dikepalai oleh

⁹ Sanusi Dg Mattata merupakan sekretaris Datu Andi Djemma, ia banyak berperang dalam perjuangan kemerdekaan. Meski menjadi sekretaris Datu, namun ia banyak mengambil bagian dalam berbagai organisasi perjuangan yang dibentuk, seperti Pemuda Nasional Indonesia (PNI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), dan Pembela Keamanan Rakyat (PKR). Sanusi selain sebagai tokoh perjuangan ia juga seorang penulis dan pengarang.

seorang bangsawan Belanda bergelar Assiten Residen¹⁰, sama dengan Poso. Politik Belanda terhadap kerajaan –kerajaan di Sulawesi Selatan ini, dengan maksud melemahkan kerajaan-kerajaan itu. Daerah Kerajaan Luwu yang sisa, dibagi-baginya beberapa bagian, yang dinamai *Onder Afdeeling*, supaya ada tempat untuk Belanda melakukan kekuasaannya lebih dekat kepada rakyat. Inilah *Onder Afdeeling* kerajaan Luwu pada masa itu : *Onder Afdeeling* Palopo, ibu kotanya Palopo, *Onder Afdeeling* Masamba, ibu kotanya Masamba, *Onder Afdeeling* Makale-Rantepao ibu kotanya Makale, *Onder Afdeeling* Malili, ibu kotanya Malili, *Onder Afdeling* Mekongga, ibu kotanya Kolaka. Tiap-tiap *Onder Afdeeling* tersebut dikepalai oleh seorang bangsa Belanda (tidak boleh bangsa Indonesia) yang bergelar Controleur atau Gezeghebber. Keadaan daerah ini tidak berubah-ubah lagi sampai Jepang datang menjajah Indonesia di tahun 1942. Sedangkan Kerajaan Luwu pada masa kedudukan Jepang pada tahun 1942 . Kerajaan Luwu yang diduduki oleh Jepang memisahkan Kolaka dari Kota Palopo dan dimasukan oleh kekuasaan Kendari, berhubungan dengan kepentingan strategi perangnya, maka dalam hubungan ini tana Toraja menyatakan lepas juga dari Palopo.

Sanusi Dg Mattata juga menyatakan bahwa tindakan Jepang ini menimbulkan rasa benci di hati rakyat. Karena memisahkan Kolaka dari Palopo, berarti mempersulit

¹⁰ Assiten Residen adalah pegawai negeri tertinggi di suatu *Afdeeling* pada masa penjajahan Belanda. Tiga sampai lima *Afdeeling* membentuk keresidenan, yang dikepalai oleh Residen, yang juga dipimpin langsung Asisten Residen. Bupati adalah kepala setempat yang bekerja sama dengan Asisten Residen, begitupun juga melalui pengakuan mereka yang tak dapat dihindari.

kehidupan rakyat Luwu, terutama penduduk Palopo dan Kolaka. Betapa tidak karena kedua wilayah tersebut telah berhubungan rapat selama beratus-ratus tahun, baik dalam soal adat istiadat, maupun dalam hal ekonomi, yang tiba-tiba diputuskan begitu saja oleh Jepang sehingga menyebabkan banyak kesulitan. Daerah kerajaan di masa NIT (Negara Indonesia Timur), dalam pemerintahan Negara Indonesia Timur, dikeluarkan suatu peraturan tentang “ Penggabungan Daerah Sulawesi Selatan” , peraturan mana dikisahkan dengan penetapan Resident Sulawesi Selatan pada tanggal 12 November 1948, yang menetapkan *Onder Afdeeling* Kolaka dimasukkan kembali dalam *Afdeeling* Luwu. Maksud yang terpenting dari politik penggabungan tersebut ialah hendak membujuk dan menyenangkan hati Datu Luwu dan Hadatnya. Demikian pula rakyat di kedua wilayah tersebut (Palopo dan Kolaka), yang pada waktu itu sedang berontak melawan Belanda. Akan tetapi siasat itu tidak ada gunanya, karena yang dituntut Datu dan rakyatnya pada waktu itu, bukanlah kembalinya Kolaka ke dalam kekuasaan Palopo, akan tetapi yang dituntut, ialah kemerdekaan Indonesia 100 % tanpa syarat, sesuai dengan maksud proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Tulisan lain yang terkait tentang strategi dan kemerdekaan yaitu Membela Indonesia “ Perjuangan Rakyat Luwu mempertahankan Kemerdekaan”, yang ditulis oleh Rasyid Ridha , mengungkapkan mengenai sejumlah perlawanan rakyat Luwu melawan penjajah pada masa itu juga, telah muncul golongan-golongan nasionalis diantara pegawai-pegawai negeri, guru-guru sekolah dan kaum intelektual yang dapat pendidikan formal yang memiliki keterampilan-keterampilan administrasi dan

organisasi dengan wawasan yang lebih luas yang banyak berperang sebagai organisator-organisator pada masa itu. Mereka antara lain Andi Makkulau Opu Daeng Parebba, Andi Tenriajeng, Andi Hamid, Opu Daeng Paonang, Andi Achamad, M. Yusuf Arief, Mungkasa, dr. Rambitan, Andi Kasim dan masih banyak lagi.

Terkait tentang para tokoh perjuangan, penulis melihat buku berjudul “ Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2” yang ditulis oleh Edwar L Poelinggomang¹¹ dan Suriadi Mappangara , mengungkapkan sejarah Sulawesi Selatan menempatkan batasan temporal dari periode sejak pemerintahan Hindia Belanda melancarkan ekspedisi militer 1905 (Zuid Celebes Expeditie 1905) hingga pembentukan Provinsi Sulawesi pada tahun 1960 itu meliputi wilayah yang pada periode kolonial Belanda disebut provinsi Sulawesi dan daerah bawahannya (Gouvernement Van Celebes Onderhoorigheden). Dalam pengembangan selanjutnya wilayah Provinsi ini memekarkan menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi militer itu di direncanakan untuk menduduki dan menguasai secara keseluruhan wilayah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang disebut pemerintah Sulawesi Selatan dan daerah bawahannya (Gouvernement Van Celebes en onderhoorigheden).

¹¹ Edwar L Poelinggomang merupakan seorang doktor dari Vrije Universiteit Amsterdam Belanda, beliau berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur, tetapi dia sangat paham tentang sejarah Makassar. Beliau merupakan seorang historian by training karena telah banyak mempelajari teori, metode, serta kemampuan membaca berbagai dokumen sejarah. Sedangkan Suriadi Mappangara sendiri merupakan doktor dari Universitas Gadjah Mada, beliau merupakan dosen Ilmu Sejarah pada universitas Hasanuddin Makassar dengan spesialisasi pada sejarah lokal serta sejarah Indonesia dan regional. Beliau sudah banyak menulis buku.

Periode kolonial Belanda ini ditandai dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat yang terus menerus. Perlawanan yang terus berlangsung itu menyebabkan daerah ini dijuluki “pulau Koenara” (de onrust eiland). Dalam kondisi yang demikian pemerintah mencoba bergiat meredakan dengan kebijaksanaan dengan otonomi daerah, memulikan beberapa kerajaan. Status swapraja (zelfbestuur landchap) yang pertama diberikan pada kerajaan Bone pada tahun 1931 dan berikutnya adalah kerajaan Gowa pada tahun 1938. Sementara kerajaan-kerajaan lain tetap dalam pemerintahan langsung pejabat Hindia Belanda.

Poelinggomang dan Mapangara menjelaskan tokoh-tokoh politik Sulawesi turut mendukung proklamasi dan ikut dalam rapat pertama panitia persiapan kemerdekaan (PPKI) pada tanggal 18 Agustus hingga 22 Agustus 1945. Dalam rapat tanggal 19 Agustus dicapai kesepakatan Sulawesi menjadi satu Provinsi dan Dr. Ratulangi dilantik menjadi Gubernur. Proklamasi dan pembentukan Negara dan pemerintahannya itu tidak segera mendapat pengakuan sekutu mengingat tokoh-tokoh nasional yang tampil memproklamasikan kemerdekaan itu, Soekarno dan Moh. Hatta adalah pihak yang berkolaborasi dengan Jepang. Akibatnya sekutu menerima Netherlands Indie Civil Administration (NICA) menjadi bagian yang integral dan pasukan sekutu dalam menyelesaikan tahanan perang di Indonesia. Berdasarkan pada pengakuan kedaulatan itu, tokoh-tokoh politik dan pemuda pejuang di Sulawesi Selatan mengorganisasikan demonstrasi massal untuk menuntut dibubarkan NIT dan RIS dan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mereka berhasil direalisasikan. Dalam pidato

kenegaraan Presiden Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1950, ia menyatakan pembubaran RIS dan kembali ke negara kesatuan RI, di Sulawesi Selatan berkobar peristiwa KNIL pada tahun 1950 kemudian diikuti dengan gerakan DI/TII pimpinan Abdul Qahar Muzakkar dan gerakan Permesta. Dan dalam buku ini pula penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia para pemuda-pemuda yang ada di Sulawesi Selatan membentuk wadah-wadah perjuangan dengan tujuan dapat menampung perjuangan pemuda yang tertata dengan baik. Bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, disebut penuh rasa haru dan tanggung jawab. Namun kebahagiaan itu terganggu ketika kembalinya pihak Belanda dengan bentukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang ingin membentuk kembali pemerintahan di Indonesia. Munculnya kembali penjajahan telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk berusaha dan bertekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia sehingga titik darah penghabisan. Oleh karena itu para pemuda bersama rakyat berjuang untuk melawan penjajah. Ditandai dengan munculnya beberapa golongan atau kelompok pemuda dan rakyat segera membentuk wadah atau organisasi perlawanan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi perjuangan yang terbentuk seperti Soekarno Muda (SM), Pemuda Nasional Indonesia (PNI), dan Pembela Keamanan Rakyat (PKR).

Karya lain yang mengkaji tentang Luwu yaitu Sarita Pawiloy yang berjudul Sejarah Luwu, buku ini membahas tentang Luwu pada masa kerajaan yang luas

wilayahnya mencakup batas Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Kolaka (Sulawesi Tenggara) hingga Poso (Sulawesi Tengah), dari tiga daerah kekuasaan kerajaan Luwu di atas, masing-masing memiliki seorang kepala daerah yang bergelar Ana Tellu, ketiga daerah kekuasaan itu adalah: (1). Makole Baebunta, wilayah kekuasaannya meliputi kampung Baebunta ke Utara sampai ke Poso, hingga ke Timur ada Kolonadale (Sulawesi Tengah), (2) Maddika Bua , wilayah kekuasaannya meliputi kampung Bua ke Selatan dari arah Barat sampai daerah Massenrempulu (sekarang Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan), (3) Maddika Ponrang, wilayah kekuasaannya meliputi kampung Ponrang hingga pantai teluk Bone dan masuk ke wilayah Pitumpanua (sekarang masuk dalam Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan).

Pawiloy juga membahas tentang budaya politik Kerajaan Luwu. Dari semua Kerajaan besar terkenal di Sulawesi Selatan, pemerintahan Luwu relatif paling tenang. Pergantian raja berlangsung damai. Seorang raja meninggal baru diadakan rapat paripurna adat dua belas (ade seppulo dua) . Lembaga ini diciptakan oleh Patipasaung, raja Luwu masa Islam yang ke 2 yang memerintah tahun 1615-1637. Sistem pemerintahan kerajaan Luwu dikenal dua lembaga kekuasaan, yang ade' asera (hadat Sembilan) dan ade' seppulo dua (hadat dua belas). Ade' asera berfungsi mengawasi pelaksanaan pemerintahan, sedangkan ade'sapullo dua berfungsi sebagai lembaga pemilih raja. Badan pelaksana pemerintahan empat orang yang bisa disebut To Maraja (Pakkatenni Ade). Keaduan berada pada kepala-kepala wilayah, yaitu raja-raja utama. Misalnya wilayah selatan di bawah Madika Ponrang yang membawahi Bajo,

Larompong dan Pitungpanua. Kalau muncul masalah darurat, Datu Luwu memanggil Madika Bua, dianggap ketua kepala-kepala wilayah oleh Datu. Ketiga kepala wilayah dinamakan “ Anak Tellue”. Perihal pelaksanaan kerajaan, Datu dibantu oleh sebuah badan yang beranggotakan empat pejabat, yaitu Opu Patunru, Opu Pabbicara, Opu Tomarilaleng dan Opu Balirante. Opu Patunru mempunyai tugas mewakili raja dalam kebijakan umum, Opu Pabbica menegakkan keadilan, Opu Tomarilaleng mengurus keperluan utama istana dan Opu Balirante mengatur sendi-sendi kesejahteraan masyarakat. Keempat Opu tersebut dinamakan “ Pakkatenni Ade”. Kerajaan Luwu memberi tempat terhormat kepada kelompok masyarakat pendatang. Sejak masa pemerintahan raja Luwu. Dewa raja (1507-1514), ada tiga kelompok yaitu masing-masing berasal dari Cenrana, Wage dan Lalenganre yang dipimpin oleh Matowa, yang selanjutnya disebut Matowa Tellue. Dalam buku ini juga menuliskan perlawanan Luwu terhadap kekuasaan Belanda. Pada masa kedatuan Andi Iskandar di Luwu terjadi beberapa kali pertempuran. Pertempuran terbesar ialah di Palopo, kedua di Baebunta dan ketiga di Redo, Larompong dan sistem perang gerilya oleh H. Hasan dan Tojabi, Pong Tiku, Pong Simpín dan terakhir gerakan tanpa bentuk pimpinan Tojabi.

E. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan yang besar dimana kerajaan-kerajaan yang terdapat di wilayah ini, yang dahulu merupakan kerajaan-kerajaan sekutu kini dihapuskan dan dijadikan wilayah pemerintahan dan kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda. Aturan dan peraturan yang lama digantikan dengan aturan

dan peraturan yang baru yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah Hindia Belanda mengajukan suatu susunan dan penataan pemerintahan baru di daerah itu. Pemerintah Sulawesi dan daerah bawahannya (*Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*) diatur secara bertingkat ke bawah bagian pemerintahan (*Afdeling*), cabang pemerintahan (*OnderAfdeling*), daerah adat (*adatgemeenschap*) dan kampung (kampong).

Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1906 setelah dicapainya surat pernyataan pendek yang di tandatangani oleh penguasa kerajaan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan untuk memaksa penguasa bumiputera mengakui bahwa mereka telah menyerahkan kekuasaan penuh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan di mana kerajaan Sulawesi Selatan secara otomatis berintegrasi masuk kedalam negara republik Indonesia. Tak mudah menyebarkan kabar kemerdekaan di tangan kesewenangan-wenangan Jepang yang belum mau mengaku kalah dari sekutu, namun berita proklamasi disiarkan ke pelosok Sulawesi. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan raja Luwu pada masa itu Andi Djemma yang antara lain menyatakan kerajaan Luwu adalah bagian dari wilayah kesatuan republik Indonesia.

Strategi perjuangan pemuda dalam revolusi kemerdekaan di Luwu merujuk pada pendekatan politik, dimana politik yang sering diartikan sebagai upaya manusia mempertahankan dan merebut kekuasaan, kecenderungan ini menjadikan politik sebagai cara mengatur dan memanfaatkan strategi dalam hal tertentu. Dalam hal tertentu strategi bisa dipahami sebagai sumber daya. Menurut Gramsci terdapat dua

cara dari kelompok yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya yaitu dengan cara represif dan persuasif. Cara kekerasan represif yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa disebut dengan dominasi, sedangkan cara persuasifnya dilakukan dengan cara yang harus melalui konsensus dengan tujuan untuk melanggengkan dominasinya tanpa mendapatkan perlawanan, inilah yang dimaksud dengan hegemoni. Hegemoni adalah suatu kemenangan yang didapatkan melalui sebuah mekanisme consensus ketimbang melalui suatu penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi dari satu atau lebih kelompok di dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya.¹²

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut penuh rasa haru dan tanggung jawab, namun kebahagiaan itu terganggu ketika kembalinya pihak Belanda dengan Netherlands Indies Civil Administration yang ingin membentuk kembali pemerintahan di Indonesia. Munculnya kembali penjajah telah membakar semangat rakyat Indonesia untuk berusaha dan bertekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Dimana dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia para pemuda-pemuda di Sulawesi Selatan membentuk wadah-wadah perjuangan atau organisasi perjuangan, di Luwu sendiri wadah perjuangan yang dibentuk yaitu Soekarno Moeda. Soekarno Moeda dibentuk oleh pemuda progresif dan kaum republik, mereka membuat suatu strategi

¹² Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 119, 121.

untuk menghadapi kembalinya Belanda dan sekutu. Strategi yang mereka buat yaitu pertama merebut senjata Jepang yang berada di Kota Palopo, kedua memperluas jangkauan keanggotaan guna menambah anggota baru.

F. Sumber Penulisan dan Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian sejarah yang ilmiah pemakaian metode sejarah sangatlah penting.¹³ Sejumlah sistematika penelitian terangkum dalam metode sejarah, setiap penelitian dalam merekonstruksi objek masa lampau. Adapun prosedural dalam pengumpulan data penelitian ini tidak terlepas dari empat tahapan penelitian yaitu tahapan pencarian data atau pengumpulan data, tahap kritik terhadap data (kritik internal dan kritik eksternal), tahap menginterpretasikan data dan tahap penulisan atau historiografi.

¹³Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 94.

Heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahapan awal pada metode penulisan sejarah yang diarahkan pada kegiatan penjajakan, pencarian serta pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan sumber sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

Dalam penelitian lapangan penulis mendatangi langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diinginkan yang lebih akurat nantinya digunakan sebagai bahan atau sumber dalam penulisan sejarah. Data yang dimaksud berupa arsip langsung dari lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab, antara penulis dengan orang-orang yang dianggap mengetahui peristiwa yang akan dibahas. Dalam melakukan metode wawancara penulis menemui salah satu tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui peristiwa tentang perlawanan pemuda terhadap Belanda yang dibocengi oleh tentara NICA.

Tahap kedua kritik sumber pada tahap ini yang dilakukan oleh penulis adalah melihat kembali sumber apakah sesuai atau tidak. Ditahap ini penulis membaca berbagai macam buku yang berkaitan dengan judul tesis yang penulis akan kaji, penulis juga mendatangi perpustakaan daerah Luwu dan Kota Palopo

untuk mencari buku yang berkaitan, selain itu penulis juga mendatangi langsung perpustakaan provinsi Sulawesi Selatan yang berada di kota Makassar. Tidak hanya itu penulis juga membaca Arsip tentang Hadat Besar Kota Palopo dan Luwu di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak lupa pula penulis juga mencari jurnal, koran, majalah, yang berkaitan dengan tulisan saya.

Tahap ketiga interpretasi pada tahap ini data yang diperoleh kemudian di seleksi, dimana peneliti berusaha menentukan data mana yang akan digunakan dalam penulisan. Dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui secara pasti mana data primer dan data sekunder. Data primer merupakan arsip-arsip yang memiliki kaitan dengan pembahasan penulis sedangkan data sekunder merupakan data yang berupa buku-buku, makalah, jurnal, koran, yang berhubungan dengan yang ditulis sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan karya tesis.

Penulisan historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah. Pada tahap ini penulis sudah menyusun ide-ide tentang hubungan suatu fakta dengan fakta lainnya melalui interpretasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran sesuai dengan yang diinginkan maka perlu diadakan susunan pembahasan, dan dalam penulisan kali ini pembahasan terbagi menjadi empat bab. Bab pertama pendahuluan pada bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini. Uraian selanjutnya berkenaan dengan tujuan atau mamfaat penelitian yang memuat alasan-alasan tentang tujuan penulisan proposal tesis ini, tinjauan pustaka untuk mengetahui bahan dan bagaimana tulisan ini dikaji oleh para penulis, kerangka konseptual dan teoritis, metode penelitian dan sumber. Bagian terakhir bab ini ditutup dengan mengemukakan sitematika penulisan.

Baba kedua mengurai tentang gambaran umum mengenai sejarah kabupaten Luwu dan kerajaan Luwu, Penulis meletakkan bagian ini pada bab kedua untuk mengenal lebih dalam lagi, pada bagian ini juga akan memuat seputar kondisi kabupaten Luwu pada masa kolonial Belanda, pada masa penjajahan Jepang dan pada masa revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang reaksi atas berita kemerdekaan RI, berita kedatangan tentara Australia di Makassar, berita kedatangan tentara Australia di Luwu dan insiden yang terjadi di Luwu.

Bab keempat penulis akan membahas strategis perjuangan dan peran organisasi yang di bentuk oleh para pemuda revolusi di Luwu.

Bab kelima yaitu bab penutup, yang meliputi kesimpulan terhadap uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

BAB II

SEJARAH SINGKAT TANA LUWU

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Kerajaan Luwu yang merupakan Kerajaan tertua sekaligus terbesar di Sulawesi. Wilayah Kerajaan Luwu yang membentang dari Poso (Sulawesi Tengah) hingga Kolaka (Sulawesi Tenggara), selalu mengalami perubahan wilayah , mulai dari zaman dinasti Kerajaan, pendudukan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa revolusi kemerdekaan. Begitu pula sistem pemerintah yang selalu mengalami perubahan, kedatangan Belanda pada tahun 1905 berusaha memaksa Luwu menyetujui suatu perjanjian yang menguntungkan Belanda. Belanda mengajukan tuntutan agar Datu harus bersedia menandatangani perjanjian Pendek (*Korte Verklaring*), yang sangat merugikan Kerajaan Luwu. Dengan ditanda tangannya *Korte Verklaring*, berarti Kerajaan Luwu telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda. Setelah Belanda menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu pada pendaratan tentara Belanda yang ditantang oleh hulubalang Kerajaan Luwu Andi Tadda bersama dengan laskarnya di Ponjalae Pantai Palopo pada tahun 1905. Belanda selanjutnya membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah di seluruh wilayah Kerajaan Luwu mulai dari Selatan, Pitumpanua ke Utara Poso, dan dari Tenggara Kolaka (Mengkongga) ke Barat Tana Toraja. Pada pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemerintahan di Luwu dibagi atas dua tingkat pemerintahan yaitu: pemerintahan

tingkat tinggi dipegang langsung oleh pihak Belanda, pemerintahan tingkat dua dipegang oleh pihak Swapraja.¹⁴ pada tahun 1905

A. Sejarah Tana Luwu Dari Masa ke Masa

1. Luwu Pada Masa Kerajaan

Letak Kerajaan Luwu bila dilihat pada peta kepulauan Indonesia berada pada areal sentral atau pusat Nusantara. Pulau Sulawesi atau Celebes terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia, sementara Luwu berada pula di bagian tengah pulau Sulawesi. Pusat Kerajaan yang disebut wilayah Wara (atau Ware') dimulai pada daratan bagian tengah agak ke hulu dua sungai besar yakni cerekang dan Ussu. Bagian pantai ialah teluk Ussu ujung utara teluk Bone. Wilayah Wara masa awal kerajaan adalah area segi tiga Finsemouni- Ussu-Cerekang.

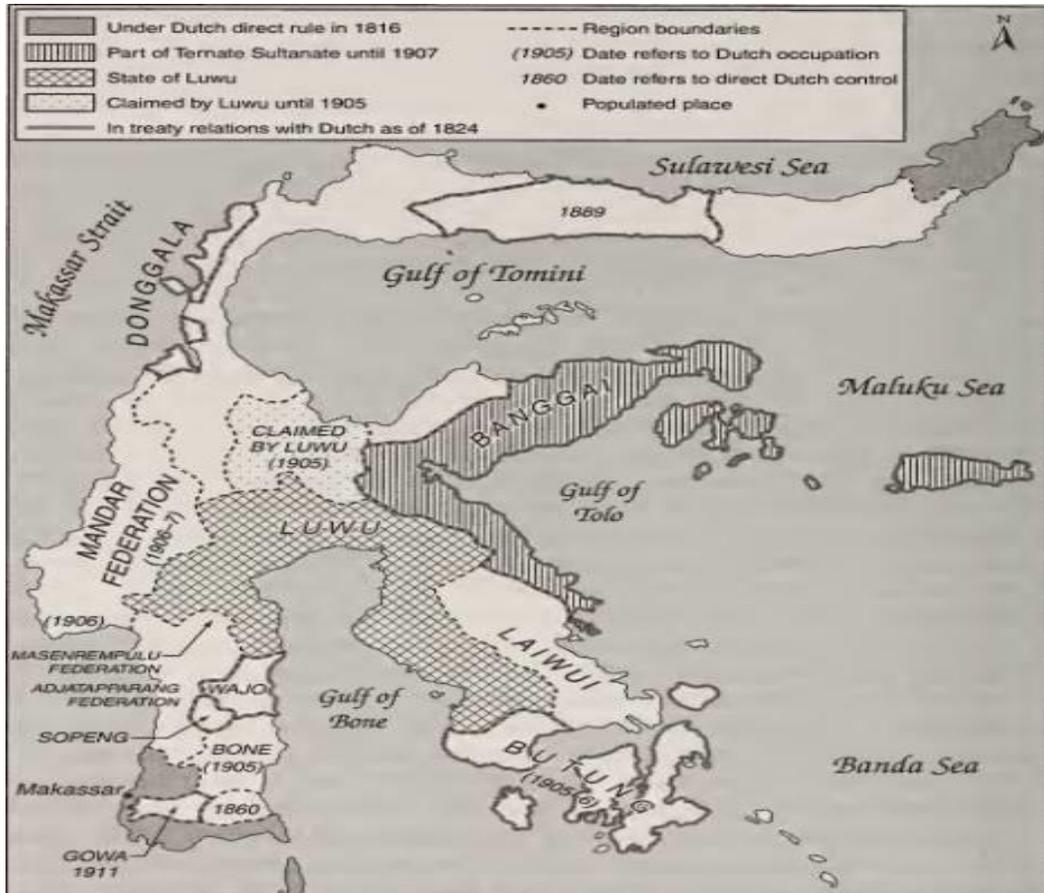
Sistem pemerintahan periode kedatuan Luwu bercorak monarki, dengan sistem administrasi yang bercorak primordial, dimana semua aparat pemerintahannya adalah keluarga bangsawan dan tidak banyak peluang bagi rakyat untuk dapat masuk dalam struktur pemerintahan kedatuan. Walaupun demikian model kekuasaan yang dibangun mengarah pada pelayanan publik, memperhatikan kesejateraan dan ketentraman rakyat. Dalam hubungan itulah dibangun tradisi pengawasan atas kekayaan penguasa dengan mendata kekayaannya sebelum dan sesudah menjadi datu, suatu tatanan yang dibangun untuk membatasi dan menghalangi penyalagunaan kewenangan dalam

¹⁴ Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh Pemerintah pribumi secara Swapraja, pada masa pemerintah Belanda Di Luwu.

penyelenggaraan pemerintah demi memperkaya diri sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan kedatuan Luwu adalah monarki, namun memiliki asas atau bersifat demokratis, karena mempertimbangkan kepentingan publik.¹⁵

¹⁵ Edwar L. Poelinggomang, *Mozaik Sejarah "Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat"*, (Pustaka Sawerigading, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), hlm. 56.

Peta Kerajaan Luwu



2. Luwu Pada Masa Kolonial Belanda

Belanda mulai menuju Luwu tahun 1905, sesudah menaklukan Kerajaan Bone, Gowa, dan Kerajaan- Kerajaan lainnya di Sulawesi¹⁶. Setelah Belanda berhasil menaklukan Kerajaan Bone dan Gowa pada tahun 1905, rencana penaklukan

¹⁶ Idwar Anwar, *Ensiklopedi Sejarah Luwu*, Komunitas Kampung Sawerigading (Kampus) bekerja sama Pemda Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, hlm. 41.

selanjutnya diarahkan pada Kerajaan Luwu pada tahun 1906. Ketika itu yang menjadi Datu adalah Andi Kambo Daeng Risompa, ibunda Andi Djemma. Kedatangan Belanda tersebut telah diperkirakan sebelumnya oleh rakyat Luwu dengan mengingat bahwa Belanda sebagai salah satu bangsa penjajah yang bersifat serakah, pasti tidak akan lama datang juga untuk menjajah daerah yang subur ini sebagaimana yang dilakukan terhadap daerah-daerah lain. Utusan Belanda Daeng Paroto membawa nota tuntutan ke Luwu pada tanggal 14 Juni 1905. Isinya singkat yaitu: A. Luwu melepaskan Poso, sebagai imbalan Luwu diberi ganti rugi Belanda B . Raja dan hadat Luwu harus menandatangani “ *Korte Verklaring* ” C. Raja dan hadat Luwu harus melepaskan hak-haknya atas bea cukai barang-barang yang keluar masuk di Luwu dan diserahkan kepada Gubernur (Belanda) D. membayar denda f.6.000, karena terlambat membalas permintaan Gubernemen.

Pada tahun 1905 Belanda berusaha memaksa Luwu menyetujui suatu perjanjian yang menguntungkan Belanda. Pada tanggal 11 September 1905 seorang opsir Belanda Daeng Peroto mendarat di Pojanglae, guna mengadakan perundingan dengan Andi Tadda. Perundingan itu menjadi insiden, dikarenakan Andi Tadda terang-terangan menolak kehadiran Belanda untuk mengadakan perdagangan di Kerajaan Luwu. Penolakan ini disebabkan oleh penindasan yang dilakukan Belanda terhadap tempat-tempat yang telah dikuasaanya sehingga Andi Tadda dengan tegas mengusir utusan dari Belanda dan Daeng Paroto. Penolakan ini dilakukan oleh Andi Tadda dengan menampar muka opsir Belanda dan mengusirnya. Tindakan yang dilakukan itu menjadikan Andi Tadda yakin pihak Belanda pasti akan melancarkan serangan

terhadap Kerajaan Luwu. Oleh karena itu Andi Tandda memohon Datu Luwu, Andi Kambo Opu Daeng Risompa agar menyingkir ke kampung Baramase yang berjarak sekitar 20 kilometer dari istana Datu. Langsung Dengan adanya insiden tersebut, maka berkobarlah peperangan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pertempuran tersebut hanya berlangsung satu hari, dan Andi Tadda pada hari itu juga berhasil dibunuh oleh pasukan Belanda.¹⁷

Melihat kenyataan tersebut, memaksa Andi Kambo Opu Daeng Risompa (Datu Luwu) menyatakan bersedia merunding dengan pihak Belanda. Dalam perundingan itu pihak Belanda mengajukan tuntutan agar Datu harus bersedia menandatangani Pernyataan Pendek *Korte Verklaring* yang sangat merugikan kedudukan kekuasaannya. Adapun isi pokok dari pernyataan pendek itu adalah sebagai berikut :

1. Raja-raja mengakui daerahnya sebagai dari Hindia Belanda.
2. Raja-raja berjanji tidak akan berhubungan dengan pemerintahan lain.
3. Raja-raja mengaku tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda.¹⁸

¹⁷Sanusi Dg Matatta, *Luwu Dalam Revolusi*,(Makassar : Bakti Baru, 1967), hlm.198.

¹⁸ Bayusuryaningrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*, (Jakarta : Dewaruci Press, 1981), hlm.64.

Di tanda tangaannya *Korte Verklaring*,¹⁹ berarti wilayah Kerajaan Luwu telah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Setelah Belanda menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu pada pendaratan tentara Belanda di kerajaan Luwu. Belanda selanjutnya membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa itu juga masyarakat dipaksa untuk kerja di perkebunan milik kerajaan Luwu mulai dari Selatan, Pitumpanua ke Utara Poso, dan dari Tenggara Kolaka (Mekongga) ke Barat Tana Toraja. Pada pemerintahan Hindia Belanda, struktur pemerintahan di Luwu di bagi atas dua tingkat pemerintahan yaitu : 1). Pemerintahan tingkat tinggi dipegang langsung oleh pihak Belanda. 2). Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh pihak Swapraja.

Pemerintahan dualism dalam tata pemerintahan di Luwu pada masa itu, pemerintahan tingkat tinggi dipegang oleh Hindia Belanda dan yang tingkat rendah dipegang oleh Swapraja tetapi tetap masih diatur oleh Belanda, namun secara *de jure* pemerintahan Swapraja tetap ada. Menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, maka wilayah kerajaan Luwu mulai diperkecil dan dipecah sesuai dengan kehendak dan kepentingan Belanda, yaitu:

1. Poso (yang masuk Sulawesi Tengah sekarang) yang semula termaksud daerah kerajaan Luwu dipisahkan dan dibentuk satu *Afdeeling*

¹⁹ *Korte Verklaring* adalah perjanjian paksa yang dilakukan oleh pihak Belanda dengan kerajaan –kerajaan yang ada di Indonesia sebagai tanda takluk.

2. Distrik Pitumpanua (sekarang Kecamatan Pitumpanua dan Keera) dipisahkan dan dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan Wajo.
3. Kemudian *Afdeeling* Luwu dibagi menjadi 5 (lima) *onderafdeeling* yaitu *Onderafdeeling* Palopo, dengan ibu kotanya Palopo, *onderafdeeling* Makale, dengan ibu kotanya Makale, *Onderafdeeling* Masamba dengan ibu kotanya Masamba, *Onderafdeeling* Makongga dengan ibu kotanya Kolaka, *Onderafdeeling* Malili dengan ibu kotanya Malili.

Berdasarkan surat keputusan Nomor 49 tahun 1916 *Afdeeling* Luwu beserta daerah taklukannya, termaksud daerah Tana Toraja, berada di bawah kekuasaan seorang Asisten Resident yang berkedudukan di Palopo. *Afdeeling* Luwu pada masa itu dibagi atas lima *Onderafdeeling* yaitu:

1. *Onderafdeeling* Palopo yang terdiri atas daerah Baebunta, Rongkong, Walenrang, Wara,, Bua Ponrang, Bajo, Suli dan Larompong, wilayah ini diperintah oleh seorang Kontrolleur atau seorang perwira angkatan darat dengan gelar Gezaghebber yang berkedudukan di Palopo.
2. *Onderafdeeling* Rante Pao yang terdiri atas daerah Rante Pao, Sa'dang, Bulusu, Nanggala, Tondong, Buntau, Rante Bua, Madandan, Piongan, Dende, Pangala, Kura, Bituang, Bala, Pali, Sising dan Ulu Salo, wilayah ini diperintah oleh seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Rante Pao.
3. *Onderafdeeling* Makale yang terdiri atas daerah Makale, Minkindik, Sangala, Malimbung, Banga, Talion, Taparan, Palesan, Rano, Bua Kayu, Vau, Mapak,

Bapele dan Simbuan, daerah ini diperintah oleh seorang Kontrolleur yang berkedudukan di Makale.

4. *Onderafdeeling* Malili yang terdiri atas daerah Malili, Nuha, Lelewau, Wotu, Bura, Tamuku, Malangke, dan Masamba, wilayah ini di bawah kuasa pemerintahan dengan kedudukan di Malili.
5. *Onderafdeeling* Kolaka yang terdiri atas daerah Mingkoka di bawah pemegang kuasa pemerintahan dengan kedudukan di Kolaka. ²⁰

Pada masa pemerintahan Belanda ini kedudukan Datu/Pajung dalam lingkungan pemerintahan semakin mengalami kemunduran, terlebih lagi pemerintahan kedatuan suda mulai mendapat intervensi dari pihak Belanda. Berbagai kebijakan kedatuam sudah tidak lagi bisa benar-benar murni. Dalam masa pemerintahan Belanda ini, sistem pemerintahn bukan lagi berada dalam pengawasan kedatuan, akan tetapi berada dalam lingkup pemerintahan yang dibangun oleh Belanda, yakni Residen (semacam Gubernur tingkat I) dan asisten residen (semacam Bupati di tingkat II) dan asisten residen (semacam Bupati di tingkat II). Datu pada saman itu ialah Andi Kambo Opu Daeng Risompa

Mengenai perjuangan rakyat Luwu melawan kedudukan kolonial di wilayah Luwu, maka sejak terjadinya penadatanan perjanjian pendek hingga menjelang

²⁰ Lahadjja Patang, *Andi Djemma Datu Luwu*, (Jakarta, Januari 2002), hlm. 26

kedatangan Jepang tidak henti-hentinya diwarnai perlawanan. Perlawanan besar terhadap masuknya kekuasaan Belanda di Luwu, terjadi di Baebunta,²¹ sebuah kampung yang terletak di pinggir Sungai Rongkong (sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara). Perlawanan tersebut di pimpin oleh Makole Baebunta, Opu Tupawennei. Pada tanggal 12 November 1905 Belanda mengirimkan sejumlah pasukannya ke Baebunta untuk melakukan penyerangan. Pertempuran berlangsung di pinggir sungai tetap di sisi kanan dan kiri Jembatan Sungai Rongkong.²²

Persenjataan yang amat sederhana seperti tombak, kelewang, parang, keris, badik dan sumpit, Makole Baebunta bersama rakyat Baebunta melancarkan perlawanan. Namun kekuatan perang Belanda jauh lebih besar dari kekuatan senjata yang dimiliki rakyat Baebunta. Akhirnya pertempuran 20 hari kontak senjata, menewaskan Opu Makole Baebunta, agar perlawanan di daerah tidak berlanjut, maka pihak belanda mencoba mencegah Datu Luwu atau golongan Bangsawan untuk melakukan konsolidasi dengan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Mengisolir Datu Luwu dari masyarakat luas. Fungsi syahbandar diambil alih oleh Belanda dengan memberikan ganti rugi kepada pemerintah kerajaan Luwu, begitu pula tenaga kerja buat Datu Luwu dan Puang adnya diganti rugi dengan uang.

²¹ Sanusi Dg Matatta, *Luwu Dalam Revolusi*, hlm. 4.

²²*Ibid.*

2. Menimbulkan perpecahan di kalangan bangsawan terutama melalui birokratisasi jabatan-jabatan yang semula diangkat berdasarkan dukungan nyata dari masyarakat.

Usaha itu tidak sepenuhnya berhasil karena ternyata semangat antipasti terhadap kekuasaan kolonial Belanda masih terus terdapat hampir di seluruh lapisan masyarakat. Sampai pada tahun 1915 Belanda masih disibukkan oleh serentetan perlawanan. Pada periode 1906-1914 ada perlawanan Haji Hasan, dengan taktik Gerilya, Haji Hasan melancarkan perlawanan. Tujuan utama gerakannya; mengusir bangsa Belanda yang kafir, menolak membayar belasting (pajak) kepada Belanda ; tetapi langsung ke petugas Kerajaan Luwu, menentang pemerksaan terhadap penduduk, terutama terhadap wanita.

Perlawanan Pong Simping 1914. Pong Simping dikenal sebagai anak bangsawan tinggi dan berkelakuan baik bahkan masyarakat menyayanginya. Bersama anak buahnya menentang keberadaan Belanda dan melakukan pembunuhan terhadap terhadap orang Belanda. Karena pihak belanda merasa terancam atas kehadirannya , maka Pong Simping diperintahkan untuk ditangkap. Setelah di tertangkap ia di sidang dan diasingkan ke pulau Jawa. Perang Topoka 1914²³ Berawal dari sistem pajak Baru “ sima atuwong” yang diberlakukan oleh Belanda, masyarakat yang berada disekitar

²³ Abdullah, *Perang Topoka*. (Palopo: Kantor Dep.P.& K Kab. Luwu.1985), hlm. 36.

Larompong dan Suli semakin kesal. Dengan dipimpin oleh Andi Ranreng Opu Tomenu melakukan perlawanan dengan melakukan penangkapan terhadap orang Belanda di Topoka. Namun mereka gagal dan ditangkap dan diasingkan ke Pulau Jawa. Mereka adalah Andi Renreng, Andi Mangile dan Jusuf. Perlawanan non fisik yang dilakukan oleh Opu Daeng Risaju melalui organisasi Serikat Islam/ PSII 1930-1942.²⁴

3. Luwu Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jendral Ter Poorten, Panglima Tentara Hindia Belanda, menandatangani piagam penyerahan tanpa syarat kepada Dai Nippon Teikoku di Kalijati, Bandung. Sejak saat itu seluruh daerah Hindia untuk Belanda termasuk Sulawesi Selatan berada di bawah kekuasaan tentara pendudukan Jepang.²⁵ Kedatangan Jepang di Sulawesi Selatan disambut baik oleh rakyat, karena dianggap telah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Hal ini sejalan dengan kepentingan perang Asia Timur Raya, semua yang berbau barat dan Belanda harus di hilangkan dari persada Indonesia. Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia waktu itu sangat menguntungkan tentara pendudukan Jepang. Di mana-mana mereka dielukan, diterima dengan tangan terbuka. Berita kedatangan Jepang di Luwu diterima oleh

²⁴ Hastina Dahlan, *Opu Daeng Risaju: Pelopor Kemerdekaan di Luwu 1930-1949*, (Ujung Pandang : Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. 1990), hlm .45.

²⁵ Edward L. Poelinggomang & Suariadi Mappangara, *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2*. (Sulawesi Selatan : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, MSI cabang Provinsi Sulawesi, 2005), hlm. 120.

Kahar dari seorang Perwira Intelejen Jepang bernama Ogata. Sesampainya di Luwu, Andi Djemma menjemput pasukan Jepang di perbatasan. Kerajaan Luwu menerima pasukan Jepang dengan tangan terbuka dan bahkan disambut dengan suka cita. Jepang tiba di Palopo pada tanggal 10 Maret 1942 sekitar jam 14:00 disambung dengan rasa gembira dari ribuan rakyat yang telah lama menanti. Pemerintah kerajaan dalam hal ini Datu Andi Djemma mengadakan suatu acara atau resepsi di istana Datu untuk melangsungkan perkenalan. Pihak Jepang pada saat itu dengan caranya memperkenalkan diri kepada rakyat dan khususnya kepada pemerintah kerajaan Luwu, maupun sebaliknya. Mereka memberitahukan kepada pemerintah dan rakyat di Palopo bahwa seluruh Indonesia sudah dalam kekuasaan tentara Nippon dan supaya rakyat bersama pemerintah setempat bekerja terus seperti sedia kala. Kedatangan Jepang yang kedua kalinya di Palopo, Datu mendapat perintah untuk melanjutkan pemerintahannya dengan kekuasaan penuh. Disamping perintah yang diberikan kepada Andi Djemma untuk kekuasaan penuh, ia juga ingin merombak susunan hadatnya karena ada salah satu anggota hadatnya yang tidak bisa lagi diajak bekerjasama. Maka disusunlah suatu formasi yang baru susunan anggota-anggota hadatnya. Adapun susunan anggota hadat lama yang digantikan sebagai berikut:

Opu Patunru : Andi Maradang

Opu Pabbicara : Andi Djelling

Opu Tomarilaleng : Andi Baso Lanrang

Opu Balirante : Andi Pangu

Susunan anggota hadat yang baru adalah sebagai berikut:

Opu Patunru : Andi Maradang Opu Dg. Bau

Opu Pabbicara : Andi Pangerang Opu Tosinilele

Opu Tomarilaleng : Andi Mattangkilang

Opu Balirante : Andi Pangu Opu Topaleong²⁶

Sistem pemerintahan pada masa Jepang memang masih tetap mempertahankan model pemerintahan Hindia Belanda yang memadukan antara model pemerintahan militer dengan pemerintahan sipil. Diterapkannya sistem ini, sebab Jepang menyadari bahwa masyarakat Luwu telah terbiasa dengan sistem pemerintahan bangsawan yang berdasarkan system panggadereng yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, dengan dalih untuk menentramkan rakyat, Jepang pun lebih menitik beratkan sistem pemerintahan militer dari pada sistem sipil yang telah ada. Upaya ini tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Osamu (Osamu Serei) tahun 1942 yang berbunyi :

“ Karena bala tentara Dai Nippon hendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon dan juga hendak mendirikan ketentraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama-sama rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Timur Raya bersama-sama , maka dari itu bala tentara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah-daerah yang didudukinya, supaya ada ketentraman yang sentosa dengan segera”.

²⁶ Team Penyusun. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia oleh Rakyat Luwu.* (Palopo: Badan Penggerak Pembina Potensi “ Angkatan 45” Dewan Harian Cabang Kabupaten Luwu), hlm. 11.

Demikian pemerintah Jepang mendirikan sekolah- sekolah yang berbasis pendidikan militer. Oleh Jepang dibentuklah Seinendan dan Helho serta menunjuk Andi Achmad sebagai kepala atau Seinendan Cho. Terbentuknya sekolah tersebut Andi Achmad sebagai pemuda yang memiliki jiwa nasional dan sifat-sifat hati-hati memanfaatkan dengan sepenuhnya pendidikan militer ala Jepang tersebut. Andi Achmad menjalin hubungan komunikasi dengan pemuda-pemuda yang meliputi seluruh wilayah Luwu. Dengan pendidikan militer yang diberikan oleh Jepang, maka lambat laun pemuda-pemuda yang tergabung dalam sekolah tersebut menyadari dan membangkitkan semangat perjuangan.

Sampai akhir 1942, sikap masyarakat Luwu yang sangat menguntungkan tentara pendudukan Jepang. Dimana-mana rakyat menerima kedatangan Jepang dengan tangan terbuka. Dianggap sebagai bangsa penyelamat dari kolonialisme Belanda. Hal tersebut tak urungnya pihak Jepang yang terus berupaya melancarkan berbagai macam propaganda kepada rakyat Luwu khususnya. Propaganda Jepang yang sering dikemukakan bahwa Jepang dan Indonesia adalah saudara, berasal dari satu bangsa yaitu Asia. Propaganda yang sama juga dilakukan terhadap umat Islam sebagai umat yang mayoritas di Palopo.²⁷

²⁷ Nawir. *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Daerah Palopo 1945-1950*. (Ujung Pandang: Depdikbud dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 1993), hlm .16-17.

Akan tetapi , setelah seluruh daerah di pesisir pantai dan sebahagian pengunungan berhasil diduduki, mulailah Jepang memperlihatkan sifat angkuhnya dan tindakan kejamnya. Di saat itu kepercayaan rakyat mulai luntur. Rakyat Luwu mulai dibatasi untuk menikmati hasil jerih payahnya selama ini, seperti sagu, kelapa, beras dan barang kebutuhan lainnya, dilarang dijual kepada pihak lain, melainkan harus kepada Jepang tentunya dengan harga yang sangat murah. Buruh dan petani harus dipaksa bekerja keras. Pemaksaan tersebut hingga memunculkan semboyan “sebutir beras sama harganya dengan sebutir telur”. Selain itu, Jepang melakukan tindakan yang tak terpuji yang bertentangan dengan agama dan adat rakyat Luwu.

Jepang pun kembali menampakkan kekejamannya dengan melakukan penyiksaan kepada salah seorang tokoh perlawanan pada masa penjajahan Kolonial Belanda yakni Tojabi. Ia dipukuli dengan menggunakan kayu hitam hingga jatuh pingsan, kemudian dipenjarakan tanpa diberikan sesuap makanan. Akhirnya ia pun meninggal dalam penjara. Selain melakukan penindasan dan kekejaman terhadap masyarakat umum di Luwu, Jepang juga melakukan berbagai upaya untuk menekan segala tindak tanduk yang dilakukan organisasi pergerakan saat itu. Beberapa organisasi pergerakan tersebut ditangkap dan dianiaya. Salah satu tokoh dari PSII, Achmd Cambang ditangkap oleh Kampe Tai. Ia disiksa dan dijebloskan kepenjara Masamba hingga meninggal. Pada periode Jepang di Luwu, hampir seluruh organisasi pergerakan yang pernah ada sebelumnya ibarat mati suri. Dengan menggunakan sistem tangan besi, inilah yang diinginkan pemerintah Jepang agar tidak ada bentuk

perlawanan dari masyarakat. Namun, dengan menggunakan cara rahasia atau gerakan bawah tanah berbagai organisasi tetap berjalan.

Menggunakan caranya, Harada berhasil memeralat Hadat Luwu untuk menghukum Kahar Muzakkar. Atas keputusan hadat, ia dijatuhkan hukuman “*Ripaoppangi Tana*” yang artinya diasingkan dari Tana Luwu untuk seumur hidupnya.²⁸ Pada bulan Desember 1943 Hadat yang dibentuk Datu Luwu yang baru berjalan selama delapan bulan, dipecat dan digantikan oleh pihak Jepang dengan Hadat yang baru. Dianggapnya anggota Hadat lama adalah buatan Belanda. Perubahan susunan anggota Hadat tersebut, akibat dimotori Andi Baso Lanrang yang berusaha berkhianat pada Datu.

Adapun susunan Hadat Luwu buatan Jepang itu, adalah:

Opu Patunrru : *Andi Jelling*

Opu Pabbicara : *Andi Baso Lanrang*

Opu Tomarilaleng : *Andi Kaso*

Opu Balirante : *Andi Mappanyompa*

Karena kenyataannya Jepang mulai menampakan sifat aslinya. Di mana-mana terlihat kekerasan dan kekejaman Jepang. Mereka menendang memukul, menempeleng, selain itu, setiap pagi orang diperingatkan harus menyembah bendera

²⁸ Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontakan*. (Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1992), hlm. 59.

dan sujud kearah Matahari terbit dengan maksud menyembah “ Tenno Heika”, Mikado Jepang²⁹. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Luwu, kenyataan ini bercampur aduk dalam kebencian yang mendalam.

Kekejaman Jepang terus berlanjut, pada hakikatnya untuk mematikan patriotism Masyarakat Luwu yang di kenal sebagai daerah yang tak pernah habis-habisnya merongrong kekuasaan Belanda. Pemerintah Jepang memisahkan daerah Luwu dari Kolaka dan dimasukan kedalam kekuasaan Kendari. Tindakan Jepang tersebut membuat rakyat Luwu dan rakyat Kolaka kecewa, karena hubungan yang erat antara kedua wilayah tersebut selama bertahun-tahun berlangsung dengan baik dalam soal adat istiadat maupun dalam bidang ekonomi, kini berantakan sehingga mengakibatkan banyak orang dengan tiba-tiba kehilangan mata pencariannya yang menimbulkan berbagai kesulitan. Pada masa pendudukan Jepang wilayah Afdeling Luwu diubah namanya menjadi Ken Kanrikan Luwu. Ken Kanrikan dibagi menjadi beberapa Bun Ken Rikam yaitu:

- 1) *Bun Ken Rikan Palopo*
- 2) *Bun Ken Rikan Malili*
- 3) *Bun Ken Rikan Makale*
- 4) *Bun Ken Rikan Masamba*

²⁹ Marwanti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia JilidVI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 5.

Untuk pejabat pemerintah Bumi Putra hanya di tempatkan di wilayah tingkat Swapraja, distrik dan kampung. Untuk tingkat Swapraja ditempatkan Syuko yang berkebangsaan Indonesia. Sedangkan untuk tingkat distrik dan kampung pejabatnya dikenal dengan nama Syanco dan Kuco.³⁰

Pemerintah Jepang tidak merubah struktur pemerintahan pada zaman Belanda , yang di tetapkan tentara Dai Nippon pada masa berkuasa di Luwu (tahun 1942). Pada prinsipnya hanya meneruskan struktur pemerintahan yang telah di tetapkan oleh Belanda dengan mengubah penyebutan sesuai dengan bahasa Jepang dan menenpatkan pejabat berkebangsaan Jepang menggantikan posisi pejabat yang dahulunya di duduki oleh pejabat berkebangsaan Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetapi diawasi secara ketat oleh pemerintah Militer Jepang yang sewaktu-waktu siap menghukum penjabat Sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah Andi Kambo Opu Tenrisompa. Ketika meninggal kemudian ia di ganti pada tahun 1935 oleh putranya yang bernama Andi Patiware yang kemudian bergelar Andi Djemma.

Pada masa pemerintahan Jepang, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang tidak banyak berubah . beberapa istilah pemerintahan digunakan menggantikan istilah Belanda. Orang Belanda digantikan oleh orang Jepang dan juga pribumi untuk menarik simpatik pribumi terhadap orang Jepang yang memiliki semboyan “ Asia

³⁰ Ariandi Ghandi, *op cit*, hlm . 24.

untuk orang Asia". Sistem pemerintahan pada masa Jepang masih tetap mempertahankan model pemerintahan Hindia Belanda yang memadukan antara model pemerintahan militer dengan dengan pemerintahan sipil. Diterapkannya sistem ini sebab Jepang menyadari bahwa masyarakat Luwu telah terbiasa dengan sistem pemerintahan bangsawan yang sangat dihormati, ada dua prioritas dalam kebijaksanaan pemerintah selama pendudukan Jepang yakni melakukan penghapusan terhadap adanya pengaruh barat dan melakukan mobilisasi demi kemenangan Jepang.

B. Stratifikasi Sosial, Kondisi Budaya Dan Peran Agama Dalam Masyarakat Luwu

1. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial atau lapisan sosial di dalam suatu masyarakat jelas terdapat dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Stratifikasi sosial atau yang disebut dengan pelapisan sosial dalam sebuah masyarakat mengarah pada kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Setiap wilayah atau daerah memiliki sistem pelapisan sosial tradisional berhubungan dengan tingkat kekerabatan, ikatan kekeluargaan dan keturunan. dari pandangan itu menentukan tinggi rendahnya struktur sosial masyarakat tersebut.³¹ Masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat

³¹ Amirullah, *Gerakan Gerilya Serta Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Bulukumba 1951-1957*, (Universitas Hasanuddin), hlm. 12.

ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial. Bagi mereka mempertahankan pelapisan sosial dipandang sebagai satu syarat memperjaya.³² Dalam masyarakat Luwu dikenal 3 lapisan masyarakat, yaitu anakarung (bangsawan), to maradeka (lapisan masyarakat biasa), dan ata (hamba sahaya). Namun dalam pelapisan masyarakat Luwu (Sulawesi Selatan) pada hakekatnya hanya terdiri dari dua, yakni anakarung dan to maradeka.

Anakarung merupakan lapisan masyarakat yang paling tinggi, lapisan ini pada masa To Manurung diyakini sebagai keturunan dewata yang merupakan manusia unggul yang bertugas memerintah di bumi. Namun dalam perkembangannya, keyakinan tersebut perlahan-lahan memudar, walau demikian dalam pemilihan Datu/Pajung hanya lapisan inilah yang mempunyai hak untuk menempati posisi tersebut. Lapisan ini diwarisi secara turun-menurun berdasarkan pertalian darah. Pengaruh pemuda dari golongan bangsawan sangat berperang aktif mempertahankan kemerdekaan, tekanan yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap rakyat Indonesia, khususnya di Luwu sangatlah terasa pengaruhnya, penderitaan rakyat dan berbagai macam perpecahan yang terjadi sesama rakyat telah menggugah hati para bangsawan untuk melakukan perjuangan. Semua itu terlihat dengan kurangnya kebebasan rakyat untuk bergerak, kebebasan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan

³² Prof . A. Daliman , *Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2017), hlm. 67.

kepentingan rakyat, maka sebagai carapun dilakukan oleh pemuda dari golongan bangsawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka berinisiatif untuk membentuk suatu wadah perjuangan. Pada tanggal 18 Agustus malam harinya atau bertepatan dengan malam 11 ramadhan, Terbentuklah suatu wadah pergerakan perjuangan yang dinamai organisasi Soekarno Moeda, Pendiri dari wadah Soekarno Moeda yaitu Andi Achmad dan Andi Makkulau, mereka berdua adalah putra dari datu Andi Djemma. Serta beberapa pemuda lainnya.

Lapisan to maradeka merupakan lapisan masyarakat kebanyakan, lapisan ini cukup fleksibel dalam struktur masyarakat Luwu, apalagi sistem mobilitas sosial masyarakat Luwu memiliki sifat yang cukup luas, maka pada lapisan yang disebut penguasa, tidak hanya terdiri atas golongan yang berasal dari lapisan anakarung saja. lapisan penguasa yang bisa juga disebut elit dari masyarakat ini. Golongan maradeka yang juga terbagi dalam beberapa tingkat, tingkat pertama di duduki oleh para pejabat pemerintah, tingkat kedua dalam golongan maradeka ditempati oleh orang-orang merdeka dalam masyarakat dikenal dengan nama tau samara yakni orang-orang merdeka yang menduduki jabatan tertentu dalam sistem pemerintahan, beserta dengan keturunan mereka.³³ Orang-orang yang dapat masuk dalam elit penguasa ini adalah orang-orang yang telah menunjukkan prestasi sosial. Mereka terdiri dari: (1) to panrinta yaitu mereka yang berasal dari anakarung maupun to maradeka yang menjadi

³³ Heddy Shri Ahimsa Putra, *Patron & Klien di Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: KAPEL PRESS 2007), hlm. 97.

pendeikian, pemimpin agama, dan orang-orang berilmu lainnya, dan telah bekerja untuk permasalahan masyarakat. (2) to sugi adalah orang kaya, baik anakarung maupun to maradeka yang karena keuletannya berusaha sehingga dapat menjadi penguasa yang sukses yang membuatnya menjadi kaya dan terpandang dalam masyarakat dan kekayaan yang dimiliki mereka mampu mengatur kesejahteraan masyarakat pada umumnya. kedua jenis golongan tersebut ditempatkan dalam lapisan elit sosial masyarakat, baik mereka yang berasal dari lapisan anakarung maupun to maradeka, orang-orang yang menempati posisi tersebut biasanya dapat menikahi dengan para anak bangsawan.

Dan pengaruh pemuda dari golongan to maradeka juga berperang aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka turut serta dalam membentuk suatu wadah perjuangan di Luwu bersama dengan golongan bangsawan, melalui wadah perjuangan tersebut M. Yusuf Arief seorang pemuda dari golongan to maradeka beserta rekan-rekannya melakukan gerakan bawah tanah, tindakan perlawanan tersebut masih bersifat "semi rahasia", sebagaimana tujuan utama dari wadah perjuangan tersebut awalnya untuk mematahkan semangat unsur-unsur kolonial. Maka wadah perjuangan sementara bersifat semi rahasia artinya bahwa wadah tersebut didirikan untuk menjadi wadah perjuangan masyarakat. Masyarakat Luwu mengetahui akan keberadaan wadah perjuangan tersebut terutama yang berasal dari kalangan pemuda. Namun bagi kalangan Jepang dan pihak Belanda dirahasiakan. Setelah terbentuknya wadah tersebut, maka terasa bahwa keberadaan senjata sangat perlu bagi kelangsungan perjuangan,

keberadaan tersebut tentunya sebagai bahan perlengkapan dan persediaan bagi pemuda dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Pada awalnya wadah perjuangan giat mencari senjata dengan cara ilegal dengan pihak Jepang, namun berbagai usaha tersebut selalu mengalami kegagalan.

Lapisan ketiga yaitu ata, ata dibagi kepada tiga lapisan, ketiga lapisan tersebut adalah ata sossorang, ata ribuang dan ata taijangang. yang tergolong lapisan utama adalah budak turun temurun dan diperbudak oleh satu keluarga. Yang termaksud lapisan kedua adalah budak karena hukuman, budak yang karena berbuat kesalahan sehingga ia dijatuhi hukuman atau dia kalah dalam peperangan. lapisan ketiga yaitu orang yang diperbudak oleh orang yang pernah jadi budak.³⁴ Para pemuda pada golongan ini sangat banyak membantu dalam hal mempertahankan kemerdekaan, mereka sangat berperang aktif dalam mengawal datu Luwu ketika tentara Belanda menyerang istana datu, mereka membawa datu Luwu ke sebuah perkampungan terpencil untuk melindungi datu dari serangan tentara Sekutu.

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Luwu

keadaan sosial budaya dalam suatu daerah memberikan suatu gambaran khusus akan masyarakat dalam daerah tersebut. Setiap daerah memiliki nilai-nilai budaya tersendiri, hal ini disebabkan oleh lingkungan sosial di mana masyarakat itu berada

³⁴ Mattulada, *Latoa, Suatu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis, Makassar* (Disertasi, 1975), hlm .76.

sebagai suatu kesatuan sosial yang memberikan berbagai macam tingkahlaku yang kemudian menjadi kebiasaan karena dilakukan berulang kali. seperti yang dikemukakan oleh Koentjraningrat, bahwa :

“Paham adat istiadat lebih luas paham kebudayaan itu tak perna dapat kita pandang lepas dari suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan tata kelakuan dari hasil kelakuan manusia, masyarakat merupakan hasil jaringan kelompok-kelompok yang memangku kebudayaan tadi, masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan.”³⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa masyarakat yang membentuk kesatuan-kesatuan sosial dan kebudayaan, dimana kebudayaan itu ada tanpa adanya tingkah laku sosial masyarakat Luwu yang terwujud dalam pergaulan hidup dan keseluruhannya tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pemenuhan tuntunan hidup masyarakat.

3. Peran Agama Dalam Masyarakat Luwu

Islam masuk abad XVI dan saat itu pusat pemerintahan kerajaan Luwu sudah pindah ke Malangke. pembawa ajaran Islam ke kerajaan Luwu, yakni Abdul Makmur (Datu ri'Bandang), Sulaiman, (Datu ri' Pattimang), dan Abdul Jawad (Datu ri' Ditiro). Ketiga ulama itu berasal dari kerajaan Minangkabau yang menempuh pendidikan Islam di kesultanan Aceh. Mereka menyebarkan Islam atas mandate langsung dari Sultan Johor. Pada awalnya mereka ke Makassar (Kerajaan Gowa) tetapi dakwanya

³⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta : Akasara baru, 1974), hlm.103.

tentang Islam ditolak mentah-mentah. Islam, mungkin dipandang terlalu aneh dari segi konsep, mengingat mereka sudah memiliki konsep khas dan sudah turun-temurun. Besar juga kemungkinan, bahwa raja Gowa menyarankan trio ulama itu ke Luwu dulu, karena disanalah semua raja-raja mengakar. Akhirnya para ulama itu membentangkan layar kembali, bergerak melingkar menyusuri teluk Bone, maka sampailah mereka di Malangke Luwu. Akhirnya mereka menghadap ke Datu La Patiware' Daeng Parabbung (Raja Luwu yang berkuasa waktu itu). Terjadilah dialog panjang lebar antara pihak kerajaan dan para ulama. Datu La Pattiware akhirnya menerima Islam. ³⁶

Mayoritas penduduk Luwu beragama Islam, hal ini tidak terlepas dari eksistensi Luwu sebagai daerah yang pertama kali menerima ajaran dan menganut Islam. Orang Luwu menjadi muslim pada abad ke 17, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sarita Pawiloy, bahwa:

“ Pada perjalanan sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, Luwu lah yang mula-mula menerima agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad ke dunia ini, bukan kerajaan Gowa maupun kerajaan Bone, ketika agama Islam mulai disebarkan oleh tiga ulama terkemuka dari SumateraBarat. Kerajaan Luwu mula-mula didatangi, sebab menurut keterangan pedagang Melayu, kerajaan Luwu merupakan kerajaan terbesaar di Sulawesi Selatan. oleh karena itu berangkatlah tiga ulama, masing-masing Khatib Tunggal Abdul Makmur, Khatib Sulaeman dan khatib Bungsu, ke Luwu dan mendarat di kampung patimang kurang 20 kilometer sebelah Utara kota Palopo. Kedatangan mereka disambuut dan diterima oleh

³⁶ H..L. Purnama, *Kerajaan Luwu Menyimpan Banyak Misteri*, (Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, 2014), hlm. 61,62.

*Datu Luwu. Datu yang merupakan keturunan Sawerigading dengan rela menerima dan menyatakan menganut ajaran agama Islam pada tahun 1603.*³⁷

Pada saat penguasa Belanda datang ke Luwu, mereka menemui satu bentuk pemerintahan kerajaan yang diatur oleh berdasarkan Syariat Islam (SI), hal ini terlihat nyata dengan kedudukan penjabat Qaddi sebagai anggota cabinet adat 12 dalam menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Luwu. Olehnya itu suatu hal yang wajar jika kedudukan agama Islam telah cukup kuat dalam tata kehidupan masyarakat Luwu di masa itu. Islam telah dianut/ secara luas oleh sebagian besar masyarakat Luwu secara fanatic dan boleh dikatakan membudaya. Keadaan seperti ini telah terjadi oleh karena penerimaan Islam sebagai agama bermula ketika penguasa mereka menganut Islam dan mengajurkan seluruh rakyatnya mengikutihnya. Oleh karena itu dalam sikap mereka tetap berpegangan atau tidak banyak menyimpan dari nilai-nilai, kaedah-kaedah kemasyarakatan dan kebudayaan yang telah ada. Tetapi walaupun demikian perlu diketahui bahwa pelaksanaan ibadah masing-masing, sering dicampur baur oleh masyarakat dengan tatanan ritual keagamaan mereka terdahulu.

Dapat disimpulkan pula bahwa perpecahan yang di alami oleh kerajaan Luwu, membuat masyarakat Luwu pada saat itu sangat kecewa, karena hubungan antara wilayah sangat erat kaitannya, baik soal adat istiadat, sosial , ekonomi, kini berantakan

³⁷ Sarita Pawiloy, dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang : Departemen P& K, 1981), hlm. 35.

sehingga mengakibatkan banyak orang dengan tiba-tiba kehilangan mata pencariannya yang menimbulkan berbagai kesulitan.